

Pengaruh Implementasi *E-Budgeting* dan *E-Procurement* Terhadap Efisiensi Belanja Daerah dalam Akuntansi Keuangan Sektor Public

Nurhuda Ardillah¹, Antong², Junaidi³

¹ Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Palopo, Palopo City, Sulawesi Selatan

² Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Palopo, Palopo City, Sulawesi Selatan

³ Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Palopo, Palopo City, Sulawesi Selatan

¹⁾nrhdardillah@gmail.com ²⁾antong@umpalopo.ac.id ³⁾junaedi@umpalopo.ac.id

Article Info

Article history:

Received Feb 25, 2026

Accepted Apr 23, 2026

Keywords:

E-Budgeting; E-procurement;
Regional Spending Efficiency;
Public Sector Accounting

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of e-budgeting and e-procurement implementation on regional spending efficiency in the context of public sector financial accounting. The study used a quantitative approach, with a population of the entire Region Apparatus Organizations (OPD) in Palopo City, the sample was selected through a purposive sampling method of 60 respondents. Data were collected through questionnaires and analyzed using multiple linear regression through SPSS. The results indicate that e-budgeting and e-procurement have a major impact on the effectiveness of local expenditure. The implementation of both systems has been shown to increase transparency, data accuracy, and the effectiveness of the budgeting and procurement processes. The results of this study indicate that digital transformation in the public financial system is a strategic step in realizing efficient, transparent, and accountable budget governance. Therefore, local governments need to improve the competence of their apparatus and strengthen their technological infrastructure to optimize the implementation of both systems to support regional spending efficiency.



© 2022 by the authors; licensee FEB UMP. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Corresponding Author:

Nurhuda Ardillah
Department of Accounting
Faculty of Economy & Business
University, Muhammadiyah Palopo
Email: nrhdardillah@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pada era digitalisasi pemerintahan, perubahan sistem keuangan publik menjadi fokus utama untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah di Indonesia. Salah satu wujud nyata dari perubahan ini adalah penggunaan sistem yang berbasis elektronik, seperti

e-budgeting dan *e-procurement*, yang berfungsi sebagai alat strategis dalam modernisasi birokrasi keuangan publik (A'yun & Hartaman, 2021).

E-budgeting memiliki peran penting dalam mendukung proses perencanaan serta penganggaran secara digital, yang dapat meminimalkan risiko manipulasi data dan mempercepat proses birokrasi di sektor keuangan. Sementara itu, *e-procurement* memberikan kesempatan untuk melakukan pengadaan barang dan jasa secara online, guna meningkatkan efisiensi belanja dan mengurangi kemungkinan terjadinya *fraud* (A. S. Apriliani *et al.*, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho & Ayem, (2021) mengindikasikan bahwa pengungkapan laporan keuangan berpengaruh besar terhadap transparansi keuangan sektor publik, meskipun kontrol internal belum menunjukkan pengaruh yang signifikan. Di samping itu, temuan dari penelitian Frankoe *et al.*, (2021) juga menyebutkan bahwa *e-procurement* memberikan efek positif pada penggunaan anggaran daerah, meskipun belum terukur secara langsung.

Meskipun telah diterapkan secara luas, efektivitas *e-budgeting* dan *e-procurement* dalam meningkatkan efisiensi serta akuntabilitas keuangan daerah masih menghadapi beberapa kendala. Rendahnya penggunaan sistem digital di sejumlah daerah disebabkan oleh keterbatasan kemampuan tenaga kerja dan infrastruktur teknologi yang masih kurang memadai (Fikriyah & Trisnawati, 2022). Peningkatan kemampuan aparatur melalui pelatihan teknis yang berkelanjutan serta pengembangan infrastruktur teknologi, seperti koneksi internet yang stabil dan perangkat lunak yang saling terhubung, menjadi syarat penting untuk keberhasilan penerapan sistem tersebut. Selain itu, standarisasi dan integrasi antar-aplikasi keuangan daerah juga diperlukan agar semua proses anggaran, pengadaan, dan pelaporan dapat berlangsung secara bersamaan dan transparan (Narimawati *et al.*, 2024).

Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja menekankan pentingnya meningkatkan sistem keuangan digital sebagai sarana untuk mengelola anggaran dengan lebih baik. Sasaran efisiensi anggaran nasional sebesar Rp306,69 triliun pada tahun 2025, yang juga mencakup efisiensi dalam transfer ke daerah, menunjukkan bahwa transformasi digital melalui *e-budgeting* dan *e-procurement* memiliki peranan penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) (Tjeme, 2025). Keberhasilan dalam penerapan kedua sistem ini sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, kesiapan infrastruktur, serta komitmen dari aparatur pemerintah daerah (Mubaraq *et al.*, 2025).

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan betapa pentingnya penerapan *e-budgeting* dan *e-procurement* dalam memperkuat pengelolaan keuangan ditingkat daerah. A. Apriliani *et al.*, (2022) menemukan bahwa *e-budgeting* memiliki dampak positif terhadap transparansi dan tanggung jawab dalam pengeluaran daerah. Di sisi lain, Ariadi *et al.*, (2024) mengungkapkan bahwa *e-procurement* memiliki efektivitas dalam mengurangi peluang terjadinya penipuan selama proses pengadaan barang dan jasa. Penelitian yang dilakukan Prayitno, Henro, Anggita, (2025) menekankan bahwa *e-budgeting* dan publikasi laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, sementara Handoko, (2022) menunjukkan bahwa *e-procurement* berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran walaupun belum melakukan pengukuran langsung terhadap efisiensi belanja.

Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh implementasi *e-budgeting* dan *e-procurement* terhadap efisiensi belanja daerah dalam konteks akuntansi keuangan sektor publik. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan bukti nyata mengenai seberapa efektif sistem digital dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, serta akuntabel, dan juga sebagai referensi bagi pemerintah daerah lainnya dalam memaksimalkan penggunaan teknologi informasi pada sistem keuangan publik.

Kajian Literatur

Teori Akuntabilitas Publik

Akuntansi keuangan sektor publik merupakan kegiatan untuk mengenali, mengukur, mencatat, dan melaporkan transaksi ekonomi serta keuangan badan pemerintahan yang digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan publik. Sasaran utamanya adalah untuk memberikan informasi keuangan yang tepat dan dapat dipercaya bagi masyarakat, legislatif, dan lembaga pengawas dalam menilai kinerja serta tanggung jawab pemerintah (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024).

Konsep Good Governance

Teori *good governance* yang baik menyoroti keharusan prinsip keterbukaan efektifitas, efisiensi, serta keterlibatan masyarakat dalam menjalankan pemerintahan. implementasi *e-budgeting* memperkuat prinsip transparansi karena seluruh tahap perencanaan dan penganggaran dapat diakses dan diawasi secara transparan. Selain itu, sistem ini meningkatkan akuntabilitas melalui jejak digital yang tercatat pada setiap langkah penyusunan anggaran (Haris, 2025). Di sisi lain, *e-procurement* mendukung transparansi dalam proses penyediaan barang dan jasa melalui sistem lelang online yang mendorong persaingan yang sehat antarpenyedia secara adil. Mekanisme ini membantu mengurangi peluang adanya penyelengan, kolusi, dan praktik korupsi (Handoko, 2022). Efisiensi yang diperoleh tidak hanya berupa dari penghematan anggaran, tetapi juga peningkatan mutu layanan publik serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah (Darmawan *et al.*, 2025).

E-Budgeting

E-budgeting adalah sebuah sistem yang menggunakan teknologi untuk menyusun anggaran yang membuat seluruh proses perencanaan dan pengesahan menjadi lebih terintegrasi dan efisien. Penerapan *e-budgeting* di berbagai daerah pemerintahan di Indonesia telah terbukti dapat mengurangi pengulangan anggaran dan meminimalkan potensi manipulasi, sehingga memberikan dampak positif terhadap efisiensi belanja (Sulistyo Arini & Suci Nasehati, 2022).

Namun, keberhasilan *e-budgeting* tidak hanya bergantung kepada kemajuan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kontekstual seperti kemampuan sumber daya manusia, integrasi sistem, dan efektivitas evaluasi internal (Bambang Subiyanto *et al.*, 2023). Aparat pemerintah sering kali menghadapi kendala teknis karena kurangnya pemahaman digital, sehingga perlu adanya pelatihan dan pendampingan yang terus menerus (Prayitno, Henro, Anggita, 2025). Selain itu, adanya penolakan terhadap perubahan dan kekurangan infrastruktur di wilayah terpencil juga menghambat penggunaan sistem secara maksimal (Lesmana & Hendayana, 2025).

E-Procurement

Transformasi digital melalui *e-procurement* menjadi elemen krusial dalam perubahan birokrasi dan manajemen pemerintahan masa kini (Kalupe *et al.*, 2025). Sistem *e-procurement* tidak hanya menambah efisiensi dan transparansi, tetapi juga menguatkan kejujuran dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dalam menggunakan system digital, data bisa diakses oleh masyarakat, sehingga memberikan lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan.

Pada penelitian Shafa *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa penggunaan sistem *e-procurement* dapat meningkatkan akses terhadap informasi dan mengurangi kemungkinan terjadinya intervensi dalam proses pengadaan. Dalam kajian *Systematic Literature Review*, Marita *et al.*, (2021) menemukan bahwa implementasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Indonesia belum berjalan dengan maksimal terkait transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Sekain itu, terdapat juga kesenjangan dalam penelitian mengenai penguatan peran Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang berdampak pada lemahnya dukungan terhadap pengadaan yang berkelanjutan.

Efisiensi Belanja Daerah

Efisiensi belanja daerah adalah topik penting dalam pengelolaan keuangan publik, terutama di era otonomi daerah yang memerlukan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi (Lathifah *et*

al., 2024). Melalui analisis Data Envelopment Analysis (DEA), tampak bahwa banyak provinsi di Indonesia masih belum mampu menggunakan anggaran secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rambe *et al.*, 2022). Hal ini sering kali disebabkan oleh adanya pemborosan pada pengeluaran pegawai serta barang/jasa, tanpa adanya peningkatan yang signifikan dalam output layanan publik.

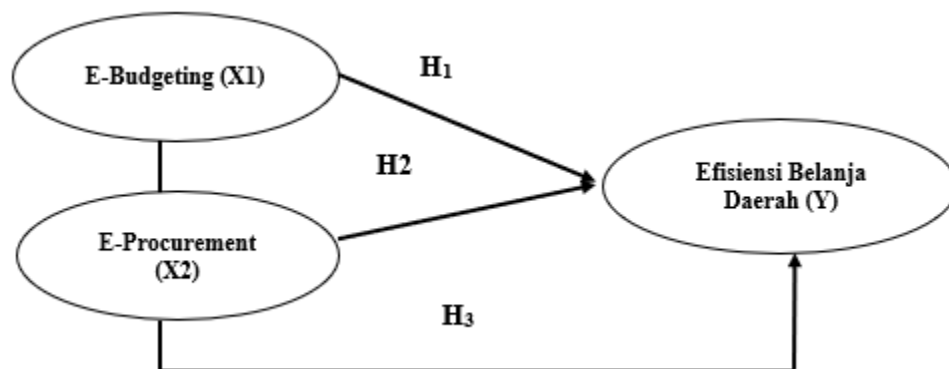
Hipotesis

H1: Implementasi *e-budgeting* berpengaruh positif terhadap efisiensi belanja daerah dalam pengelolaan keuangan publik.

H2: Implementasi *e-procurement* berpengaruh positif terhadap efisiensi belanja daerah.

H3: Implementasi *e-budgeting* dan *e-procurement* secara simultan berpengaruh positif terhadap efisiensi belanja daerah.

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang menggambarkan kondisi dengan pendekatan kuantitatif. Metode tersebut dipilih untuk mengevaluasi dampak dari dua variabel independen, yaitu implementasi *e-budgeting* (X_1) dan *e-procurement* (X_2), pada variabel dependen, yaitu efisiensi belanja daerah (Y). Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan ilustrasi yang terstruktur tentang hubungan antar variabel serta untuk menjelaskan seberapa besar pengaruhnya terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Pemerintah Kota Palopo yang telah mengimplementasikan sistem *e-budgeting* dan *e-procurement*. Populasi yang diteliti mencakup semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah kewenangan Pemerintah Kota Palopo. Metode pengambilan sampel diambil dengan cara *purposive sampling* yang berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria yang digunakan antara lain:

1. OPD yang telah menerapkan *e-budgeting* dan *e-procurement* minimal selama dua tahun;
2. OPD yang terlibat langsung dalam proses perencanaan anggaran dan pengadaan barang/jasa; dan
3. OPD yang bersedia menjadi responden penelitian.

Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sebanyak 30 OPD yang memenuhi syarat dan dijadikan sebagai sampel penelitian.

Sumber data yang digunakan adalah data primer, yang didapatkan melalui distribusi kuesioner kepada petugas atau staf bagian keuangan, perencanaan, serta pengadaan barang dan jasa di setiap OPD yang diambil sebagai sampel. Instrumen kuesioner dirancang dengan menggunakan skala likert untuk menilai pandangan responden mengenai implementasi sistem digital dan tingkat efisiensi

belanja daerah. Berikut ini adalah variabel-variabel serta indikator yang diterapkan dalam penelitian ini:

Tabel 1. Variabel Penelitian

Variabel	Keterangan	Indikator	Sumber
X1	<i>E-budgeting</i> , adalah salah satu sistem informasi yang digunakan untuk merancang anggaran dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses penganggaran. Sistem ini dapat mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk menyusun anggaran karena dilakukan secara online dan dapat diakses dimana saja. Selain itu, sistem ini juga berfungsi sebagai alat pengawasan kerja yang dapat memantau proses dalam penyusunan anggaran.	1. Transparansi proses perencanaan anggaran. 2. Keakuratan data dan informasi keuangan, serta 3. Efisiensi waktu dalam penyusunan anggaran	(Soleh & Nurcahyanto, 2019)
X2	<i>E-procurement</i> , merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengatur informasi tentang pengadaan barang/jasa. Aplikasi ini berbasis internet yang dirancang agar proses pengadaan berlangsung secara efektif, efisien dan terintegritas.	1. Efisiensi proses pengadaan 2. Integrasi sistem antar unit pengadaan, dan 3. Pengurangan potensi penyimpangan atau praktik <i>fraud</i> .	(Sholeh <i>et al.</i> , 2024)
Y	Efisiensi belanja daerah, adalah keterampilan pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran dan sumber daya keuangan dengan efisien dan hemat. Ini berarti dapat menciptakan hasil atau layanan publik yang optimal dengan biaya atau pengeluaran yang seminimal mungkin, serta dengan pembagian yang sesuai dari segi jenis maupun proporsinya.	1. Tingkat kesesuaian antara rencana dan realisasi belanja, 2. Kecepatan pelaksanaan program, dan 3. Efektivitas pencapaian output kegiatan Pembangunan.	(Rahman, 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang diperoleh mempunyai beberapa kriteria berdasarkan jenis kelamin, rentang usia, dan jabatan sebagaimana disajikan pada:

Table 2. Karakteristik Responden

Item Demografi		Frekuensi	Persentil(%)
Jenis Kelamin	Wanita	36	60.00
	Pria	24	40.00
Rentang Usia	<25	4	6.67
	26-35	15	25.00
	36-45	34	56.67
	>45	7	11.67
Jabatan	Perencanaan	17	28.33
	Pengadaan Barang dan Jasa	43	71.67

Karakteristik responden ini menunjukkan bahwa penelitian ini melibatkan aparatur pemerintah daerah yang relevan dan memiliki peran penting dalam penerapan sistem *e-budgeting* dan *e-procurement*, sehingga data yang diperoleh dapat mencerminkan kondisi aktual implementasi sistem tersebut di lingkungan instansi pemerintah.

Uji Validitas

Uji validitas adalah metode untuk menilai ketetapan pada setiap pertanyaan dalam kuesioner agar benar-benar mencerminkan aspek atau variabel yang diteliti. Instrumen yang memiliki validitas akan menghasilkan informasi yang tepat, stabil, dan dapat dipercaya. Uji ini dilakukan dengan menggunakan analisis korelasi item-total (*Pearson Product Moment*) melalui program SPSS. Sebuah item dianggap valid apabila nilai r hitung $> r$ tabel berdasarkan nilai $\text{Sig.} < 0.05$, yang menunjukkan adanya hubungan kuat dan signifikan antara pernyataan dengan skor total variabel. Kemudian variabel dianggap reliabel dengan nilai cronbach's $\alpha \geq 0,70$. Tabel berikut menunjukkan hasil pengujian SPSS untuk uji validitas dan reliabilitas.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
<i>E-budgeting</i> (X_1)	EB1	0.825	0.254	Valid
	EB2	0.810	0.254	Valid
	EB3	0.769	0.254	Valid
	EB4	0.806	0.254	Valid
	EB5	0.739	0.254	Valid
	EB6	0.778	0.254	Valid
	EB7	0.725	0.254	Valid
	EP1	0.761	0.254	Valid
	EP2	0.870	0.254	Valid
	EP3	0.842	0.254	Valid
<i>E-procurement</i> (X_2)	EP4	0.910	0.254	Valid
	EP5	0.871	0.254	Valid
	EP6	0.840	0.254	Valid
	EP7	0.860	0.254	Valid
	EBD1	0.796	0.254	Valid
	EBD2	0.799	0.254	Valid
Efisiensi Belanja Daerah (Y)	EBD3	0.868	0.254	Valid
	EBD4	0.822	0.254	Valid
	EBD5	0.868	0.254	Valid

Sumber: output SPSS, 2025

Hasil dari pengujian validitas menunjukkan bahwa semua komponen di variabel *E-budgeting*, *E-procurement*, dan Efisiensi Belanja Daerah menunjukkan nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,254) dan tingkat signifikansi (Sig.) kurang dari 0,05, sehingga pernyataan dinyatakan valid dan layak digunakan dalam penelitian.

Uji Reliabilitas

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	Cronbach's Alpha	Kriteria	Keterangan
<i>E-budgeting</i>	7	0.928	$\geq 0,70$	Reliabel
<i>E-procurement</i>	7	0.957	$\geq 0,70$	Reliabel

Pengaruh Implementasi E-Budgeting Dan E-Procurement Terhadap Efisiensi Belanja Daerah Dalam Akuntansi Keuangan Sektor Public
(Nurhuda Ardillah¹, Antong², Junaidi³)

Efisiensi Belanja Daerah	5	0.936	$\geq 0,70$	Reliabel
--------------------------	---	-------	-------------	-----------------

Sumber: *Output SPSS, 2025*

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai *Cronbach's Alpha* $\geq 0,70$, yang berarti semua instrumen penelitian dinyatakan reliabel. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan dalam kuesioner memiliki konsistensi internal yang tinggi dan mampu mengukur konstruk variabelnya secara stabil dan dapat dipercaya.

Uji Hipotesis

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t hitung	t tabel	Sig.
	B	Std. Error	(Beta)			
(Constant)	-0.154	0.414		-0.372	2.000	0.711
<i>E-budgeting</i> (X_1)	0.854	0.087	0.748	9.843	2.000	0.000
<i>E-procurement</i> (X_2)	0.180	0.057	0.239	3.154	2.000	0.003
Adjusted R ²	0.688					
Sig. F	0.000					

Sumber: *Output SPSS, 2025*

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang dilakukan menggunakan SPSS, diperoleh informasi mengenai pengaruh *E-budgeting* (X_1) dan *E-procurement* (X_2) terhadap Efisiensi Belanja Daerah (Y). Model regresi menunjukkan hasil Adjusted R² sebesar 0.688, yang mengindikasikan bahwa 68,8% variasi perubahan Efisiensi Belanja Daerah dapat dijelaskan oleh variabel *E-budgeting* dan *E-procurement*, dengan sisa variabel sebesar 31,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang tidak tercakup dalam studi ini.

Pengaruh *E-budgeting* terhadap efisiensi belanja daerah dalam pengelolaan keuangan publik

Penelitian ini mengindikasikan bahwa variabel *E-budgeting* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Efisiensi Belanja Daerah, dengan nilai koefisien jalur mencapai 0,854 dan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Besarnya koefisien yang signifikan tersebut menegaskan bahwa penerapan *e-budgeting* menjadi faktor krusial dalam mendorong peningkatan efisiensi pengelolaan anggaran daerah. Artinya, semakin baik implementasi *e-budgeting*, maka semakin optimal pula proses perencanaan, pengalokasian, dan penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah. Hasil ini membuktikan bahwa penggunaan *e-budgeting* dalam digitalisasi anggaran dapat mengurangi kesalahan dalam penginputan data, mempercepat proses penyusunan anggaran, dan meningkatkan integrasi antara perencanaan dan pelaksanaan program di tingkat pemerintahan daerah. Secara teoritis, temuan ini memperkuat teori akuntabilitas publik, yang menekankan pentingnya keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana publik. Melalui penerapan *e-budgeting*, setiap tahapan penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat ditelusuri secara digital (*audit trail*), sehingga mengurangi peluang terjadinya manipulasi atau penyimpangan anggaran. Sistem ini memungkinkan pihak legislatif, lembaga pengawas, dan masyarakat untuk memantau proses anggaran secara transparan, sejalan dengan prinsip *good governance* yang menuntut efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu, seperti A'yun & Hartaman, (2021) yang menyebutkan bahwa *E-Budgeting* menjadi instrumen strategis dalam reformasi birokrasi keuangan publik, karena memperkuat integritas dan transparansi pengelolaan anggaran. Penelitian Sulistyono Arini & Suci Nasehati, (2022) dan Prayitno, Henro, Anggita, (2025) juga mendukung hasil ini dengan menunjukkan bahwa penerapan *E-Budgeting* berpengaruh signifikan terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas penyusunan anggaran, serta menekan terjadinya duplikasi dan pemborosan belanja

daerah. Selain itu, A. S. Apriliani *et al.*, ((2022) mengungkapkan bahwa sistem *E-Budgeting* memberikan dampak positif terhadap efisiensi belanja daerah melalui peningkatan keakuratan data dan percepatan proses birokrasi. Secara umum, hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan penerapan *E-Budgeting* tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada komitmen aparaturnya dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penganggaran.

Pengaruh *E-Procurement* terhadap efisiensi belanja daerah dalam pengelolaan keuangan publik

Berdasarkan hasil penelitian ini *e-procurement* juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi belanja daerah, dengan nilai koefisien sebesar 0.180 dan tingkat signifikan $p = 0.003$. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik implementasi sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik, semakin efisien pula penggunaan anggaran daerah. *E-procurement* memungkinkan proses pengadaan dilakukan secara daring dengan prinsip keterbukaan dan persaingan sehat, sehingga mampu menekan potensi kolusi, korupsi, dan nepotisme pada sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan sistem ini, setiap proses lelang, mulai dari pengumuman, penawaran, hingga penetapan pemenang, dan terdokumentasi secara digital dan dapat diakses oleh publik. Hasil ini selaras dengan teori *good governance*, khususnya pada aspek transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan adanya sistem *E-procurement*, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa proses pengadaan berjalan secara efektif, cepat, dan hemat biaya administrasi. Hasil penelitian ini mendukung temuan Handoko, (2022) yang menyatakan bahwa *E-procurement* berpengaruh signifikan terhadap efektivitas serapan anggaran daerah dan berperan penting dalam memperkuat integritas keuangan publik. Selain itu, penelitian Ariadi *et al.*, (2024) juga menunjukkan bahwa sistem *E-procurement* terbukti menekan praktik fraud dalam pengadaan barang dan jasa melalui transparansi informasi lelang dan pengawasan publik. Sejalan dengan itu, Shafa *et al.*, (2021) menegaskan bahwa penerapan sistem LPSE (Layana Pengadaan Secara Elektronik) memperluas akses informasi pengadaan serta meningkatkan persaingan sehat antar penyedia barang dan jasa. Penelitian Marita *et al.*, (2021) juga mengungkapkan bahwa meskipun penerapan *E-procurement* di Indonesia masih menghadapi tantangan pada aspek integrasi dan sumber daya manusia, sistem ini tetap berkontribusi positif terhadap efisiensi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Pengaruh *E-budgeting* dan *E-procurement* secara simultan berpengaruh positif terhadap efisiensi belanja daerah

Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa secara simultan, *E-budgeting* dan *E-procurement* secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Efisiensi Belanja Daerah, yang ditunjukkan oleh nilai R^2 sebesar 0.688. Artinya, 68,8% variasi efisiensi belanja daerah dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut, sementara 31,2% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar model, seperti kapasitas aparaturnya, integrasi sistem informasi, dan kebijakan kelembagaan. Nilai R^2 yang tinggi menunjukkan bahwa kombinasi penerapan *E-budgeting* dan *E-procurement* merupakan faktor dominan dalam meningkatkan efisiensi belanja daerah. Temuan ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmawan *et al.*, (2025) yang menyatakan bahwa transformasi keuangan publik melalui digitalisasi sistem penganggaran dan pengadaan mempercepat pencapaian efisiensi serta meningkatkan transparansi anggaran. Mubaraq *et al.*, (2025) juga menguatkan temuan ini dengan menyebutkan bahwa sinergi antar *E-budgeting* dan *E-procurement* berperan dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah dan efektivitas implementasi APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

Secara empiris, kesiapan infrastruktur, kompetensi sumber daya manusia, dan komitmen pemerintah daerah merupakan faktor krusial yang memengaruhi kinerja keuangan publik. Penelitian Fikriyah & Trisnawati, (2022) menegaskan bahwa masih ada daerah yang menghadapi hambatan dalam optimalisasi *E-budgeting* dan *E-procurement* akibat keterbatasan teknis dan pemahaman

aparatur. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan berkelanjutan serta penguatan sistem integrasi antar-aplikasi keuangan pemerintah daerah merupakan aspek yang sangat krusial. Selain itu, Narimawati *et al.*, (2024) menyoroti perlunya standardisasi sistem digital keuangan daerah agar seluruh proses penganggaran, pengadaan, dan pelaporan dapat berjalan selaras dan transparan.

KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa implemetasi *e-budgeting* dan *e-procurement* berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi belanja daerah dalam akuntansi keuangan sektor publik. Temuan ini sejalan dengan teori akuntabilitas publik dan prinsip *good governance* yang menekankan pentingnya transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Penerapan *e-budgeting* memungkinkan proses perencanaan dan penganggaran dilakukan secara sistematis dan terintegrasi secara digital, sedangkan *e-procurement* mendorong efisiensi pengadaan melalui keterbukaan informasi dan persaingan yang sehat. Secara simultan, kedua sistem tersebut memperkuat pengendalian internal dan meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran daerah.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu memperkuat integrasi *e-budgeting* dan *e-procurement* sebagai bagian dari reformasi tata kelola keuangan publik. Bagi masyarakat, efisiensi belanja daerah berdampak pada peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan publik serta meningkatnya kepercayaan terhadap pemerintah. Sementara itu, bagi perusahaan atau penyedia barang dan jasa, penerapan sistem digital menciptakan proses pengadaan yang lebih transparan, adil, dan kompetitif, sehingga mendukung iklim usaha yang profesional dan berkelanjutan.

Demikian hasil penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap literatur akuntansi sektor publik dengan menunjukkan bahwa digitalisasi sistem keuangan melalui *E-budgeting* dan *E-procurement* mampu meningkatkan efisiensi belanja daerah, memperkuat prinsip *good governance*, dan mendukung tujuan reformasi birokrasi keuangan publik di Indonesia. Selain itu, Penelitian ini mengidentifikasi rekomendasi kebijakan strategis yang ditujukan kepada pemerintah daerah. Fokus utama adalah pada bagaimana pemerintah daerah dapat mengimplementasikan kebijakan yang efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Rekomendasi ini dirancang untuk memberikan panduan praktis dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, L. Q., & Hartaman, N. (2021). Evaluation of E-Budgeting Implementation in Planning Budget in Maros Regency. *Journal of Government and Political Issues*, 1(2), 65–72. <https://doi.org/10.53341/jgpi.v1i2.22>
- Apriliani, A., Dirgantari, N., Hariyanto, E., & Wibowo, H. (2022). Pengaruh E-Planning, E-Budgeting, dan E-Procurement Terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. *Owner*, 7, 254–264. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1289>
- Apriliani, A. S., Dirgantari, N., Hariyanto, E., & Wibowo, H. (2022). Pengaruh E-Planning, E-Budgeting, dan E-Procurement Terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. *Owner*, 7(1), 254–264. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1289>
- Ariadi, J., Yamin, A., & Cahyono, T. D. (2024). Pengaruh Penerapan E-Procurement, Budaya Organisasi dan Etika Pegawai Sebagai Upaya Pencegahan Fraud pada Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Kasus di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat). *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(11), 12846–12857. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i12.6166>
- Bambang Subiyanto, Syamsudin, Khairul Saleh L. Tobing, Kumba Digidowiseiso, & Norakma Abd Majid. (2023). the Determinants of E-Budgeting Implementation in Indonesia: a Systematic

- Literature Review. *Journal of Accounting Research, Utility Finance and Digital Assets*, 2(2), 741–747. <https://doi.org/10.54443/jaruda.v2i2.104>
- Darmawan, M., Athalla, M. R. A., Hutasoit, O. B. Y., Cahyadi, R. D., & Lukman, F. (2025). Efisiensi Anggaran dan Dampaknya terhadap praktik Good Governance di Kementerian Dalam Negeri dalam Era Reformasi Birokrasi. *Journal of Social Contemplativa*, 3(1), 12–29. <https://doi.org/10.61183/jsc.v3i1.88>
- Fikriyah, T. M., & Trisnangingsih, S. (2022). Studi Literatur Electronic Budgeting Sebagai Peningkatan Transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd). *Seminar Nasional Akuntansi Dan Call for Paper (SENAPAN)*, 2(1), 17–27. <https://doi.org/10.33005/senapan.v2i1.168>
- Frankoe, A., Kamaludin, K., & Fadli, F. (2021). Pengaruh Perencanaan Penganggaran dan E-Procurement terhadap Penyerapan Anggaran. *The Manager Review*, 3(1), 28–55. <https://doi.org/10.33369/tmr.v3i1.19604>
- Handoko, R. W. (2022). Implementasi E-Procurement Untuk Menilai Efektivitas Pengadaan di Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Binjai. *Teknik Sipil*.
- Haris, A. (2025). Transformasi Digital Pengelolaan Anggaran Dana Desa; Studi Tentang E-Budgeting, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 5(1), 28–37. <https://doi.org/10.51577/jgpi.v5i1.752>
- Kalupe, S., Tahir, A., Amir Arham, M., & Aneta, Y. (2025). Optimalisasi Pengadaan Barang/Jasa Di Era Digital: Analisis Tantangan Dan Peluang Di Provinsi Gorontalo. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(1), 10. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2317>
- Lathifah, H., Frinaldi, A., & Eka Putri, N. (2024). Analisis Akuntabilitas Birokrasi Publik Dalam Sistem Keuangan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik. *Jurnal Professional*, 11(2), 585–592.
- Lesmana, T., & Hendayana, H. (2025). *Adaptasi Aparatur Sipil Negara Terhadap Kebijakan Digitalisasi Di Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian Kota Tarakan*. 1–12.
- Marita, L., Andriani, N., Wildan, M. A., Winata, Y. S., Syarif, M., Muhtadin, M., & Alamsyah, M. A. (2021). Contribution of Public e-Procurement to Sustainable Development Goals in Indonesia: Systematic Literature Review. *International Journal of Science, Engineering and Information Technology*, 6(1), 256–265. <https://doi.org/10.21107/ijseit.v6i1.12475>
- Mubaraq, F., Tinggi, K. P., Teknologi, D. A. N., Tarakan, U. B., Hukum, F., Studi, P., & Hukum, M. (2025). *Implikasi Pembatalan Peraturan Presiden*.
- Narimawati, U., Yani Syafei, M., & Pranata, S. (2024). Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Melalui Pelatihan Keterampilan Digital Untuk Meningkatkan Produktivitas Masyarakat Di Cirebon. In *ADIMA Awatara Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal* (Vol. 2, Issue 4, pp. 42–49). <https://journal.awatarapublisher.com/index.php/adima>
- Nugroho, A. V., & Ayem, S. (2021). The Effect of the Implementation of E-budgeting, Financial Statement Disclosure, and Internal Control on Regional Financial Management Transparency. In *ACCRUALS (Accounting Research Journal of ...*. <http://ojs.stiesa.ac.id/index.php/accruals/article/view/720%0Ahttp://ojs.stiesa.ac.id/index.php/accruals/article/download/720/291/>
- Prayitno, Henro, Anggita, R. (2025). E-budgeting untuk semua: implementasi teknologi dalam manajemen keuangan publik. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 4(April), 29–42.
- Rahman, A. Z. (2022). Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Cilacap. 22(2), 117–126. <https://doi.org/10.21831/hum.v22i2>.
- Rambe, R. A., Alisjahbana, A. S., Wibowo, K., & Muljarijadi, B. (2022). Regional split and local government spending efficiency in Indonesia. *Economics, Management and Sustainability*, 7(2), 6–18. <https://doi.org/10.14254/jems.2022.7-2.1>
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). No Title 濟無No Title No Title No Title. 2, 306–312.
- Shafa, S. I., Hidayati, T. N., & Damanik, A. F. (2021). Analisis Penerapan E-Procurement Sebagai Pembaharuan Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa. *Al - Hakam Islamic Law & Contemporary Issues*, 2(1), 1–9. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ilj/article/view/15098>

- Sholeh, M., Widjajanti, K., & Lestari, R. I. (2024). *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis Implementation of good governance in the implementation of procurement of goods and services electronically in the Central Java*. 16(3), 266–279.
- Soleh, O., & Nurcahyanto, A. (2019). *Analisa Sistem Informasi E-Budgeting Pengajuan Rencana Anggaran Perusahaan menggunakan Balance Scorecard*. 260–264.
- Sulistyo Arini, & Suci Nasehati. (2022). Analisis Implementasi E-Budgeting Dalam Mendukung Transparansi Pada Pemerintah Kota Surakarta. *Manajemen*, 2(2), 134–140. <https://doi.org/10.51903/manajemen.v2i2.175>
- Tjeme, B. B. (2025). Efisiensi Anggaran, Keberlanjutan Fiskal, dan Perekonomian Daerah. In *Detiknews*. https://news.detik.com/kolom/d-7793236/efisiensi-anggaran-keberlanjutan-fiskal-dan-perekonomian-daerah?utm_source=chatgpt.com